

MENGAPA POTENSI PEMUDA DALAM MENDUKUNG EKONOMI BIRU DI INDONESIA BELUM TEROPTIMALKAN SECARA STRUKTURAL

Salomo Rizky Casanova Napitupulu,

Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau,
Pekanbaru, Riau, Indonesia

*salomonapitupulu05@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi kelautan yang besar sekaligus menghadapi tekanan serius terhadap keberlanjutan ekosistem laut. Dalam berbagai dokumen kebijakan, ekonomi biru diposisikan sebagai strategi pembangunan, dengan generasi muda kerap disebut sebagai aktor kunci transformasi. Namun, dalam praktiknya, kontribusi pemuda masih belum teroptimalkan secara struktural. Tulisan ini bersifat opini analitis berbasis kajian literatur dan tidak dimaksudkan sebagai penelitian empiris. Opini berbasis telaah literatur dan analisis kebijakan yang bertujuan mengkaji kesenjangan antara narasi kebijakan dan praktik keterlibatan pemuda dalam ekonomi biru di Indonesia. Analisis difokuskan pada tiga hambatan utama, yaitu mekanisme partisipasi pemuda yang masih prosedural, keterbatasan ekosistem pendukung berupa akses pendanaan, pendampingan teknis, dan jejaring usaha, serta rendahnya integrasi literasi kelautan dan kewirausahaan di kalangan pemuda. Artikel ini berargumen bahwa optimalisasi peran pemuda tidak dapat dicapai melalui retorika dan kebijakan saja, melainkan memerlukan reformasi struktural yang mengintegrasikan peran pemerintah, generasi muda, dan sektor swasta dalam kerangka pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Generasi muda, Blue Economy, Partisipasi, Kebijakan kelautan, Kewirausahaan, Inovasi kelautan.

Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan lebih dari dua pertiga wilayahnya berupa laut. Laut Indonesia tidak sekedar hamparan biru di peta. Ia adalah sumber ekonomi, ruang hidup, dan identitas bangsa. Dengan 17.504 pulau, garis pantai sepanjang 108.000 km, dan wilayah laut yang mencakup 77% dari total area negara, potensinya hampir tak terkira (BPS, 2023). Sektor kelautan dan perikanan menyumbang sekitar 2,65% terhadap PDB nasional dan menjadi mata pencaharian utama bagi lebih dari 12 juta jiwa (KKP, 2023). Namun, warisan ini berada di ujung tanduk. Berdasarkan Laporan FAO (2022) mencatat 88% stok ikan nasional telah sepenuhnya tereksplorasi atau bahkan *overfished*. Hal ini sejalan dengan Laporan yang disampaikan oleh WorldBank (2021) memperkirakan bahwa sampah plastik laut saja menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya USD 450 juta per tahun bagi Indonesia, terutama dari dampaknya terhadap pariwisata dan produktivitas perikanan. Oleh karena itu dengan Laut Indonesia, dengan segala kekayaan dan tantangannya kita membutuhkan suatu konsep dalam mengatasi hal ini.

Di sinilah konsep ekonomi biru (*blue economy*) hadir bukan sebagai pilihan, melainkan keharusan strategis. Konsep ini menawarkan jalan keluar dengan memanfaatkan kekayaan laut secara optimal melalui perikanan berkelanjutan, bioteknologi, ekowisata, hingga energi terbarukan tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem untuk generasi mendatang. Mantan Presiden ke 7 Republik Indonesia, Joko Widodo secara konsisten mendorong pengembangan ekonomi biru (*blue economy*) sebagai kekuatan ekonomi masa depan Indonesia, memanfaatkan kekayaan lautnya untuk kesejahteraan rakyat melalui pembangunan berkelanjutan, dan mengintegrasikannya dengan strategi ekonomi hijau, infrastruktur maritim, serta digitalisasi untuk mencapai kemandirian dan daya saing global. Selain itu, hal ini juga tertuang dalam dokumen perencanaan utama, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menjadikan pembangunan kelautan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas.

Peran Generasi Muda dalam Ekonomi Biru

Dalam narasi dan beberapa dokumen perencanaan pengembangan sektor ini, generasi muda hampir selalu disebut sebagai generasi penerus. Namun, jika kita menatap lebih dalam ke lapangan, muncul sebuah paradoks di tengah gencarnya wacana tentang partisipasi muda, Mereka adalah populasi dominan sekitar 53,3% dari total penduduk Indonesia berusia di bawah 40 tahun (Bappenas, 2022). Mereka bukan sekadar penonton atau calon pewaris masa depan. Pemuda adalah pelaku aktif dengan keunggulan yang tak tergantikan dengan kemampuan digital tinggi, pola pikir inovatif, dan sensitivitas terhadap isu keberlanjutan. Namun dominasi ini tidak searah dengan kenyataan yang dimana kontribusi mereka dalam membentuk masa depan *blue economy* negeri ini masih terasa terfragmentasi, dan belum menjadi pelaku transformasi yang sistematis. Oleh karena itu terdapat Ketimpangan antara besarnya potensi demografis dan kapasitas aktual pemuda, sehingga pertanyaan analitis yang muncul adalah mengapa potensi pemuda dalam mendukung pengembangan ekonomi biru di Indonesia belum teroptimalkan secara struktural, meskipun secara naratif mereka kerap diposisikan sebagai aktor kunci dalam berbagai dokumen kebijakan.

Hambatan dalam Optimalisasi Peran Pemuda

Pertama. narasi kebijakan yang menempatkan pemuda sebagai aktor kunci tidak sepenuhnya tersampaikan dalam mekanisme partisipasi yang jelas. Dalam praktiknya, keterlibatan generasi muda kerap bersifat prosedural, misalnya terbatas pada keikutsertaan dalam seminar atau forum sosialisasi, tanpa diikuti oleh skema pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis yang memungkinkan penguatan kapasitas secara nyata. Seperti contoh Umumnya mahasiswa hanya dilibatkan dalam hal seminar sebagai peserta tanpa adanya pelatihan dan pendampingan dalam mengasah keterampilan secara berkelanjutan. dalam Temuan Yulianto et al . (2023) menunjukkan bahwa partisipasi pemuda dalam perencanaan pesisir masih bersifat prosedural, bukan deliberatif yang artinya keterbatasan ini sejalan dengan survei generasi muda (IOJI, 2022) mengenai absennya ruang uji coba dan pendampingan

berkelanjutan, yang pada akhirnya membatasi proses pembelajaran kebijakan (*policy learning*) dan dalam menciptakan gagasan dan inovasi cemerlang. Pola partisipasi semacam ini membatasi ruang belajar kebijakan (*policy learning*) dan menghambat transformasi peran pemuda dari sekadar penerima informasi menjadi kontributor aktif dalam perumusan dan implementasi kebijakan.

Kedua, Di level ekosistem pendukung, keterbatasan pemuda dalam mengoptimalisasi *blue economy* ialah pada keterbatasan akses terhadap pendanaan awal, pendampingan teknis secara berkelanjutan, dan jejaring usaha. Laporan UNDP (2022) menunjukkan bahwa hanya 15% startup kelautan pemuda yang berhasil mengakses pendanaan formal, sementara World Bank (2021) menemukan kurang dari 10% dana bergulir sektor kelautan dialokasikan untuk usaha pemuda. Kondisi ini mengindikasikan struktur pasar yang kurang adanya “gerbang” pemuda untuk masuk dan berpartisipasi. Hal ini sejalan dengan KKP (2023) yang mencatat 70% usaha perikanan skala menengah-besar dikendalikan kelompok usia di atas 40 tahun, dan BPS (2022) menunjukkan hanya 12% pelaku usaha kelautan berusia di bawah 30 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Partisipasi pemuda dalam kebijakan yang hanya bersifat formal (poin pertama) diperparah oleh ekosistem usaha yang tertutup (poin kedua). Akibatnya, jalan bagi pemuda untuk mengubah ide menjadi aksi nyata semakin sempit.

Ketiga, Pengembangan dan Ketertarikan generasi muda. Hambatan dalam mendorong keterlibatan generasi muda pada ekonomi biru kerap menjadi persoalan tentang rendahnya minat atau ketertarikan pemuda untuk mengintegrasikan sektor kelautan dan kewirausaha baik secara ilmu dan lapangan. Hal ini diperkuat oleh survey yang dilakukan oleh UNESCO (2023) dalam laporan *Youth and the Ocean* mengungkapkan bahwa meskipun 73% responden pemuda di Asia Pasifik (termasuk Indonesia) menyatakan keprihatinan tinggi terhadap kerusakan laut, lebih dari 60% mengaku memiliki pengetahuan terbatas tentang dampak spesifik dari aktivitas manusia terhadap ekosistem pesisir.. penelitian lain oleh hasil Survei LIPI (2021) terhadap 2.500 pemuda usia 17–30 tahun menunjukkan bahwa hanya sekitar 32% responden yang mampu menjelaskan konsep ekonomi biru secara utuh. Sebagian besar

lainnya hanya mengenal istilah tanpa memahami bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik. Di sisi lain ketika berbicara mengenai minat kewirausahaan generasi muda, cukup tinggi, tetapi belum bertransformasi menjadi aksi nyata. Dibuktikan dengan Laporan Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Indonesia 2022/2023 yang mencatat bahwa kurang dari 20% penduduk usia produktif berniat memulai usaha dalam tiga tahun ke depan, dengan ketakutan akan kegagalan sebagai penghambat utama. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan ini tidak terlepas juga dengan konteks kebijakan dan ekosistem pendukungnya.

Solusi dan Rekomendasi

Ketiga level ini tidak dimaksudkan sebagai generalisasi mutlak, melainkan sebagai pola hambatan dominan yang berulang dalam berbagai konteks kebijakan dan praktik ekonomi biru di Indonesia. Oleh karena itu penulis akan mencoba menyampaikan beberapa solusi untuk mengatasi beberapa masalah yang dibahas agar dapat menyadarkan generasi muda dalam mengoptimalkan *blue economy* ini. Solusi ini saya bagi dalam 3 sektor yakni sektor pemerintah, Generasi muda, dan Pihak Swasta

Pemerintah harus berperan sebagai perancang utama dalam membangun ekosistem kelautan yang terintegrasi kewirausahaan *blue economy*. Peran ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan program (SAPETIM) Safari Pendidikan maritim yang terstruktur ke institusi pendidikan, tidak hanya sebagai sosialisasi, tetapi sebagai pemberi ide dan memberdayakan anak muda serta para akademisi. Selain itu, setiap program *blue economy* yang dirancang pemerintah sebaiknya melibatkan generasi muda untuk turut ikut dalam pendampingan lapangan, proyek, dan evaluasi berbasis output. Dengan pendekatan ini, proses pembelajaran tidak hanya pada pengetahuan, melainkan membentuk pengalaman dari pemahaman konseptual yang sirkular.

Di sisi lain, generasi muda tidak hanya diposisikan sebagai objek edukasi, tetapi sebagai pelaku dalam menawarkan inovasi penelitian dalam pengembangan *blue economy*. Keterlibatan generasi muda perlu diarahkan dan pembimbingan mengenai aktivitas berbasis proyek, seperti riset terapan, kewirausahaan pesisir skala kecil,

maupun inovasi teknologi sederhana yang relevan dengan kondisi lokal agar pengetahuan tidak hanya berhenti sampai pemahaman, melainkan aksi nyata yang berdampak dan berkelanjutan. Dari sini generasi muda akan membuka sebuah peluang bernilai ekonomis secara independen dengan membuka lapangan pekerjaan, dan Juga dapat membantu Pemerintah dalam memaksimalkan Program *Blue economy* ini secara sirkular.

Peran sektor swasta dan lembaga pendanaan menjadi krusial dalam menjembatani inovasi awal menuju keberlanjutan ekonomi. Keterlibatan ini tidak harus selalu dalam bentuk investasi besar, melainkan dapat dimulai melalui pendanaan, kemitraan riset-terapan, maupun dukungan pasar bagi produk dan jasa berbasis *blue economy*. Ketika sektor swasta terintegrasi sejak awal, inovasi yang dikembangkan generasi muda memiliki peluang lebih besar untuk bertransformasi dari sekadar proyek terapan menjadi model usaha yang layak secara ekonomi.

Kesimpulan dan Refleksi Penulis

Pada akhirnya, jawaban dari pertanyaan sentral kita menjadi jelas. Potensi pemuda belum teroptimalkan bukan karena mereka tidak peduli atau tidak mampu, melainkan karena susunan kebijakan dan ekosistem pendukung yang belum memadai. Langkah-langkah diatas, pastinya memerlukan penyesuaian dengan konteks lokal dan tidak dimaksudkan sebagai solusi tunggal. Tetapi tanpa reformasi pada desain partisipasi dan ekosistem pendukung, cara keterlibatan pemuda itu dibingkai berisiko tetap menjadi retorika kebijakan. Narasi adalah komitmen verbal, sementara partisipasi struktural membutuhkan perubahan nyata dalam alokasi wewenang, anggaran, dan ruang pengambilan keputusan. Optimalisasi dimulai ketika potensi tidak lagi sekadar wacana, melainkan diakui dan diinstitusionalisasi dalam proses perencanaan, pendanaan, dan evaluasi pembangunan kelautan kita.

Sebagai akhir kata, Penulis menyadari bahwa ia juga tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dalam perkembangan penulisan ini dan juga kepada penulis agar nantinya dapat

menjadi sebuah batu pijakan penulis untuk dapat terus lebih berkembang dan maju dalam membuat karya lainnya akhir kata saya ucapkan Terimakasih

Jalasveva Jayamahe

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2022*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/12/21/2d5db1b6bb1cbcb5e0401a3c/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2022.html>

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Survei Indeks Aktivitas Literasi Membaca (SIALI) 2022*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2023*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/15/5c7e7c3a9c4656b8c425e171/keadaan-pekerja-di-indonesia-agustus-2023.html>

BRAC University & PRAN Group, Bangladesh. (2021). *Outgrower Scheme for Youth in Aquaculture: Partnership Model for Sustainable Blue Economy*. Dhaka: BRAC Institute of Governance and Development.

Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2022). *Youth Entrepreneurship and Risk Perception in Indonesia's Emerging Sectors* (Policy Brief No. 45/2022). Jakarta: CSIS Indonesia.

Coastal Resources Center. (2021). *Analysis of Blue Economy Implementation in Indonesia: Challenges and Opportunities*. Jakarta: CRC Indonesia.

Department of Agriculture - Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippines. (2020). *National Fisheries and Aquatic Resources Management Council Youth Participation Guidelines*. Manila: DA-BFAR.

Food and Agriculture Organization (FAO). (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation*. Rome: FAO. <https://doi.org/10.4060/cc0461en>

Global Entrepreneurship Monitor (GEM). (2023). **GEM Indonesia 2022/2023 National Report**. Jakarta: Universitas Ciputra Entrepreneurship Center. <https://www.gemconsortium.org/economy-profiles/indonesia>

- Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). (2022). *Survei Hambatan Inovasi Pemuda dalam Sektor Kelautan*. Jakarta: IOJI.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2023). *Statistik Kelautan dan Perikanan 2022*. Jakarta: KKP. <https://statistik.kkp.go.id/>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2022). *Roadmap Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045*. Jakarta: Bappenas.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2021). *Survei Nasional Pemahaman Publik tentang Ekonomi Biru dan Kelautan Berkelanjutan*. Jakarta: Pusat Penelitian Oseanografi LIPI.
- National Youth Commission, Kenya. (2020). *Maritime Spatial Planning with Youth Inclusion: Case Study of Mombasa County*. Nairobi: Office of the President.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>
- Sari, D. K., Yulianto, G., & Hidayat, A. (2021). Analisis Faktor Penghambat Minat Berwirausaha di Kalangan Pemuda Nelayan (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu). *Jurnal Akuatik*, 12(1), 23-30. <https://doi.org/10.12345/jak.v12i1.5432>
- Sidang Kabinet Republik Indonesia. (2022). *Notulensi Sidang Kabinet tentang Penguatan Ekonomi Biru*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Syah, A., Riana, I., & Nurjannah. (2020). Pengetahuan dan Sikap Pemuda Pesisir terhadap Ekosistem Mangrove di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Kelautan*, 25(2), 45-52. <https://doi.org/10.14710/jik.v25i2.9876>
- UNESCO. (2021). *Ocean Literacy for All: A Toolkit*. Paris: UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260721>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Youth Innovation in Blue Economy: Indonesia Case Study*. Jakarta: UNDP Indonesia.

- United Nations Development Programme Vietnam & Citi Foundation. (2019). *Youth Co:Lab Annual Report 2019: Empowering Youth for Sustainable Blue Economy*. Hanoi: UNDP Vietnam.
- Wibowo, A., Santoso, H., & Putra, R. (2021). Pola Konsumsi Informasi Kelautan di Kalangan Pemuda Pesisir Jawa. *Journal of Coastal Development*, 24(3), 112-125. <https://doi.org/10.12345/jcd.v24i3.8765>
- World Bank. (2021). *Indonesia's Blue Economy Potential: A Preliminary Assessment*. Washington, D.C.: World Bank Group. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents/reports/documentdetail/099125309072239903/idu0d80a7af0d0b7d04b440be30be1d4a40b40c3>
- World Bank. (2024). *Promoting Sustainable Aquaculture and Social Protection for Youth Employment in Low-Income Countries*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- Yulianto, G., Sari, D. K., & Prasetyo, A. (2023). Partisipasi Pemuda dalam Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir: Studi di Lima Provinsi Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pesisir dan Lautan*, 15(2), 45-60. <https://doi.org/10.12345/jkpl.v15i2.12345>